



PKS

#PKS
Pelayan
Rakyat

**KALEI
DOS
KOP**

2021

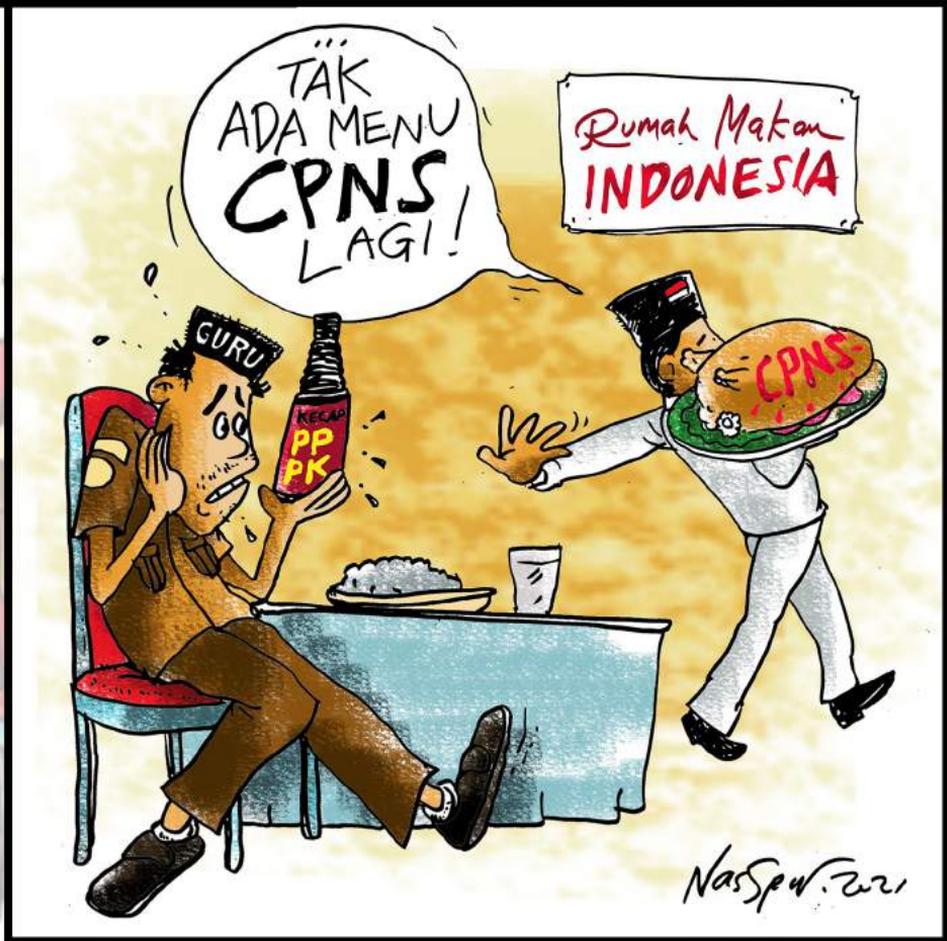
KATA PENGANTAR

Tahun baru 2022 sudah di hadapan kita. Seperti sebuah bab dalam sebuah buku cerita yang menunggu untuk dituliskan, maka lembaran perjalanan bangsa di tahun 2022 pun sudah menunggu untuk kita isi. Semua tergantung pada setiap kita, akan menuliskannya dalam bingkai pesimisme, atau menatap 2022 dengan penuh harapan, optimisme, kebersamaan, serta kesamaan tujuan sebagai satu bangsa. Dan, kunci perubahan ke arah lebih baik ada pada diri kita masing-masing, ada pada bangsa kita sendiri yang harus memiliki keinginan kuat untuk berubah, bersatu, dan menjadi bangsa yang besar.

Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen menjalankan politik kebangsaan yang mengedepankan titik temu dan kolaborasi dalam membangun bangsa. Silaturahmi Kebangsaan PKS kepada semua partai politik yang ada di parlemen serta elemen masyarakat sipil yang sudah dilakukan adalah manifestasi dari nilai perjuangan kami, dan akan terus berlanjut.

Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadikan momen akhir tahun 2021 ini sebagai saat yang tepat untuk kita bermuhasabah, merefleksikan perjalanan kehidupan kita sebagai bagian dari warga negara. Mari bertaubat dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik. Seraya terus memohon kepada Allah SWT agar bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.





Pemerintah mengeluarkan guru dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 2021.

Para guru yang menjadi pendidik hanya diterima melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini tentu mengundang kekecewaan ribuan guru honorer di Indonesia. Persatuan Guru Indonesia (PGRI) meminta kebijakan ini dikaji ulang. PKS sepakat dengan pendapat PGRI.

Apakah negara ini sudah menjadi swasta dengan menempatkan posisi guru sebagai tenaga kontrak?

Ini tentu menjadi kabar terburuk bagi semua "pahlawan tanpa tanda jasa", gelar yang kerap diberikan kepada guru sebagai garda terdepan di dunia pendidikan

Guru-guru honorer usia di atas 35 tahun mengusulkan dapat diangkat PNS tanpa tes karena ada yurisprudensi

Tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat PTT dengan Keppres juga bisa diangkat PNS tanpa tes karena pengabdian

Kami mendukung hal itu biar adil



H. Abdul Fikri Faqih

Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKS

ANGGARAN

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

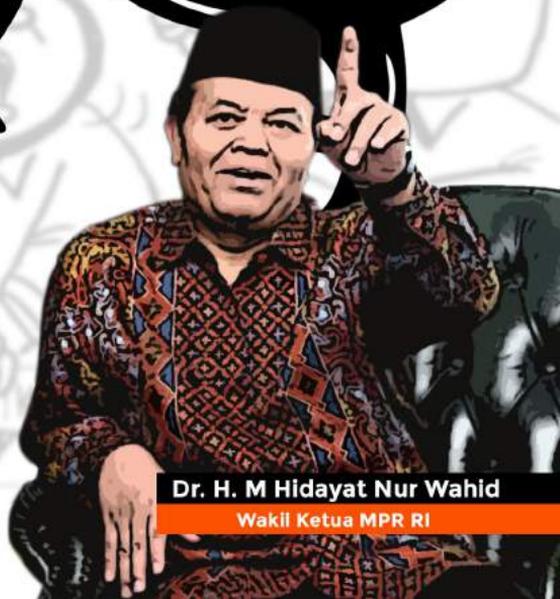


Masyarakat dikagetkan karena kebijakan santunan COVID-19 dihapus Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Risma Harini menyampaikan alasan salah satunya karena pemerintah tak lagi memiliki uang. Hal ini menimbulkan protes dari PKS.

Selain tak sesuai kesepakatan di DPR dan UU 24/2007

pembatalan dana santunan sosial ini juga tidak menampilkan sikap kenegarawanan dengan empati kepada rakyat yang terkena musibah bencana.

Padahal anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518-an miliar untuk santunan korban COVID-19 atau hanya sebesar 0,07 % dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 triliun



Dr. H. M Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI



Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono mempertanyakan alasan Pemerintah yang tetap 'ngotot' melakukan impor beras.

Padahal, keputusan impor beras oleh Pemerintah telah banyak menuai kritik keras, di tengah masa panen raya petani yang dimulai sejak Februari 2021 kemarin.

Keputusan mengimpor beras pun dinilai sangat kontraproduktif dengan seruan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing, dan mencintai produk dalam negeri.

Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari? dan Pemerintah sudah tahu kalau panen raya akan mulai bulan Februari.

Dari awal memang kelihatan bahwa Pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?

Riyono

Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan DPP PKS



Rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik mendapat kecaman dari anggota DPR.

Anggota Komisi VII DPR RI DR. Mulyanto menilai rencana menaikkan tarif dasar listrik di saat pandemi ini sangat tidak berperasaan. Menurutnya, saat ini kegiatan ekonomi masyarakat belum pulih benar. Sehingga tidak seharusnya Pemerintah melalui PLN berencana menaikkan tarif dasar listrik.

*Kami menolak tarif adjustment.
Mau pakai istilah apapun
kalau ujung-ujungnya akan
memberatkan masyarakat
akan kami tolak.*

*Bukan malah menaikkan
tarif listrik.*

*Seharusnya, selama
ekonomi dan daya beli
masyarakat masih lemah,
maka negara harus
bahu-membahu membantu
meringankan beban dan
mendorong meningkatkan
ekonomi masyarakat.*

*Dalam kondisi sulit seperti
sekarang ini, yang perlu
dilakukan Pemerintah dan PLN
adalah perpanjangan stimulus
listrik bagi masyarakat dan
UMKM yang membutuhkan.*

*Bukan justru menambah
beban mereka.*



DR. H. Mulyanto

Anggota DPR RI Fraksi PKS

TAATI ALLAH,
TAATI RASULNYA,
DAN TAATI
PEMIMPINMU!

JANGAN
MENGAMBIL HAK
ORANG LAIN!

JANGAN
BERBUAT
DZALIM!

TEGAKKANLAH
KEBENARAN!

LHO, KAN KYAI
CUMA MENGAJARKAN
UNTUK MENEGAKKAN
KEBENARAN?
TAPI KOK DI...

PERTANYAAN
YANG BAGUS!

**RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tetap diperjuangkan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai janji politik pada Pemilu 2019 lalu.**

Seperti yang dilakukan PKS di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syaikhu saat bersilaturahmi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan meminta dukungan serta doa untuk tetap istiqamah.

*Mohon doa dan dukungannya,
saat ini kami sedang
memperjuangkan RUU
tersebut sebagai bentuk
penghormatan kepada Ulama
sebagai pewaris para nabi,*

*RUU Larangan
Minuman Beralkohol,
dan RUU Kewirausahaan
Nasional.*



H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

STOP!

STOP!

LULUS
TWK
DULU!
BARU
BOLEH
LANJUT
!!

TAPI PAK,
KITA KAN SUDAH
LULUS UJI
KOMPETENSI
SEBELUM
MASUK KE KPK
!!!

DA PAK

KITA
SEDANG
PENYIDIKAN
KASUS
PAK



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa 51 orang dari total 75 pegawai yang tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK) akan dipecat dari lembaga antirasuah.

Hal itu sesuai hasil rapat KPK bersama sejumlah otoritas terkait.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DR Mardani Ali Sera,

menyatakan KPK tidak menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

meminta hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemecatan pegawai.

Mau pakai cara apapun perlu dilihat gambar besarnya bukti terhadap pelemahan KPK.

Karena mayoritas 75 itu penyidik, penyelidik, kasatgas dan pejabat eselon yang selama ini sudah mengharumkan nama KPK.

Tidak mudah punya institusi yang dicintai rakyat. Ke-75 pegawai KPK itu selama ini punya prestasi.

Apalagi para pegawai KPK tersebut justru telah menjalankan amanah konstitusi dan menjaga NKRI dari para koruptor.



DR. H. Mardani Ali Sera

Anggota DPR RI Fraksi PKS

KOK WNA
PADA BEBAS
MASUK SIH!?

WARGA SIPIL
KAYAK KITA
BISA APA..

Masuknya sejumlah warga negara asing atau WNA asal China ke Indonesia di tengah kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali jadi sorotan.

Sebab, masuknya WNA China itu memunculkan pertanyaan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani Aher ikut mempertanyakan masuknya 20 WNA asal China saat PPKM darurat Jawa Bali.

Menurut dia, masuknya WNA asal China menimbulkan pertanyaan publik seperti terkesan diistimewakan dalam PPKM darurat.

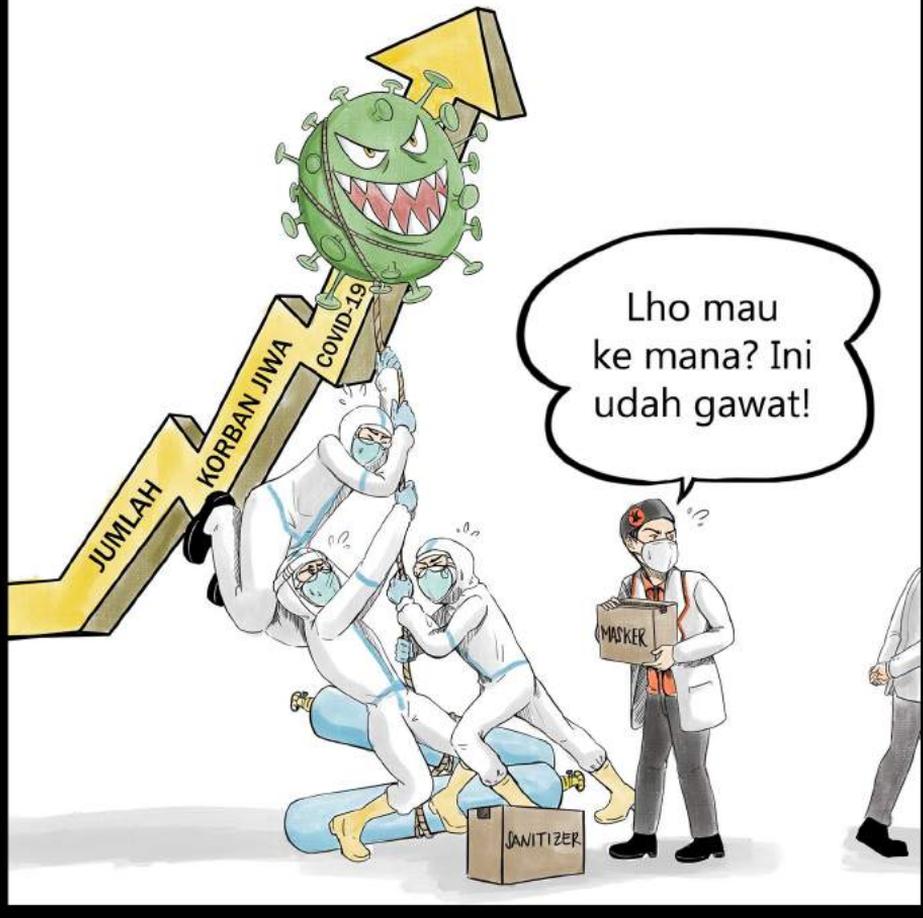
Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan.

Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian COVID-19.

Kita khawatir PPKM darurat bisa jadi tidak efektif,

DR. HJ. Netty Prasetyani Aher

Anggota DPR RI Fraksi PKS



Angka kematian akibat COVID-19 melesit

membuat banyak muncul orang tua tunggal baru dan anak yatim piatu baru yang semakin kesulitan dalam menghadapi kesulitan Pandemi. Sementara di lapangan, semua RS disesaki pasien serta oksigen langka di pasaran.

PKS melalui Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)

Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah serius dalam mengatasi gelombang kedua COVID-19 ini. Anggota Komisi IX DPR RI ini meminta pemerintah segera menyelesaikan pendataan nasional untuk anak yatim yang ditinggal wafat orang tua karena Covid-19, sehingga bentuk jaminan sosial dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.

Kewajiban negara melindungi anak yatim dan terlantar termasuk orang tua tunggal apalagi kaum ibu yang ditinggal wafat suami karena Covid-19.

Jika tidak ada perlindungan bisa jadi mereka akan lebih berat kehidupannya.

Di momen terpisah, anggota Legislatif PKS se-Indonesia memotong gajinya secara sukarela untuk disumbangkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.



DR. Hj. Kurniasih Mufidayati

Anggota DPR RI Fraksi PKS



KITA
DALAM ZONA
BERBAHAYA!



**MAYDAY!
MAYDAY!**

Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.

Tercatat total utang Pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp6.080,08 triliun atau 39,4 % terhadap PDB. Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang dibayarkan sebesar Rp317,89 triliun, meningkat Rp14,67 % dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp277,23 triliun.

Nilai tersebut menjadi sejarah baru bahwa akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran, dan rasio utang terhadap PDB tahun 2020 menjadi yang tertinggi.

Target penambahan utang pada 2022 niscaya akan menambah akumulasi utang Pemerintah saat ini, yang dinilai sudah sangat besar.

Terus meningkatnya jumlah utang ini, mencederai penerapan Fiscal Sustainability Analysis (FSA) termasuk Debt Sustainability Analysis (DSA) dalam pengelolaan utang Pemerintah.

Untuk mengingatkan kembali, dalam laporan hasil review BPK terkait kesinambungan fiskal APBN 2020, menyebutkan bahwa indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR).



H. Rofik Hananto

Anggota DPR RI Fraksi PKS

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

USTADZ ECKY
AWAL MUCHARAM,
ALEG DARI @FPKSDPRRI
SAKING INGIN MENGAWAL
KHAWATIR RUU PERPAJAKAN
LOLOS BEGITU SAJA
TANPA ADA NILAI-NILAI
KEBERPIHAKAN KEPADA
MASYARAKAT...WALAU HARUS
MENGUNAKAN SELANG
OKSIGEN KETIKA RAPAT

SEMOGA
SEHAT DAN
KUAT YA,
KANG

DOAKAN
SAYA SELALU
AMANAH YA!



Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Muharram ramai menjadi sorotan publik usai beredar unggahan di media sosial memperlihatkan dirinya tengah menggunakan selang oksigen saat mengikuti rapat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perpajakan. Ecky menjelaskan betapa pentingnya RUU Perpajakan ini harus dikawal demi kemaslahatan rakyat kecil, sehingga dirinya tetap memaksakan hadir dalam rapat tersebut.

Di saat berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, Pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah.

Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan dalam pembangunan.

H. Ecky Awal Mucharam

Anggota DPR RI Fraksi PKS



Polemik mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dikritik serta menuai kontroversial menemui titik terang.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Hal ini disambut gegap gempita terutama oleh kalangan buruh. Fraksi PKS sendiri melalui ketua Fraksi DR Jazuli Juwaini menyambut baik putusan MK ini. Beliau mengingatkan bahwa PKS sejak awal secara bulat sudah menolak UU tersebut karena merugikan rakyat luas diantaranya buruh, petani, nelayan, penyandang disabilitas, dan elemen masyarakat lainnya. Serta dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fraksi PKS menyambut baik putusan MK itu karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Dengan alasan yang sama Fraksi PKS sejak awal secara bulat menolak UU itu saat pengesahan di DPR.

Kami meminta pemerintah bijak menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun MK menyebut UU ini inkonstitusional bersyarat.



DR. H. Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) saat ini bukan prioritas untuk dibahas

Politikus PKS, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU IKN saat ini akan terlalu memaksakan. Apalagi, menurutnya, suatu rancangan undang-undang seharusnya dapat menyelesaikan masalah bangsa.

Dia menganggap jika pemindahan ibu kota bukan solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

PKS masih melihat bahwa ini belum menjadi prioritas di masa sekarang, terlalu memaksakan diri untuk kemudian membahas sebuah rancangan.

sebuah undang-undang seharusnya dapat memberikan sebuah solusi dari berbagai masalah. Sementara saat ini ada empat masalah utama yang tengah dihadapi rakyat: pengangguran, lapangan kerja, ekonomi, serta penegakan hukum.

*Pemindahan Ibukota?
Apa bisa menyelesaikan hal tersebut?*

K.H. Bukhori Yusuf

Anggota DPR RI Fraksi PKS

Habib Aboe Bakar Al-Habsy

Sekjen PKS



KATA PENUTUP

PKS mengambil ijtihad politik sebagai partai oposisi, maka sikap oposisi sebagaimana dimaksud akan ditunjukkan oleh kerja-kerja para anggota Fraksi PKS di Parlemen. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Sekjend PKS menyampaikan terima kasih atas langkah-langkah strategis yang telah diambil Fraksi PKS selama setahun terakhir.

Tak dapat dipungkiri bahwa Fraksi PKS telah tampil secara atraktif namun dalam bingkai konstitusional. Yang artinya, bahwa dalam menjalankan peran sebagai partai oposisi, Fraksi PKS tidak hanya bersikap asal beda. Seluruh sikap dilakukan melalui kajian ilmiah yang mendalam, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara argumentatif. Demikian pula penyampaian kritik dan saran yang dilakukan kepada pemerintah, selalu menggunakan jalur-jalur resmi sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.

Hal ini memang sudah menjadi komitmen kita Bersama. Bahwa dalam menjalankan peran oposisi, PKS akan selalu berperan sebagai oposisi yang bermartabat. Yang artinya, kita akan selalu menilai pekerjaan pemerintah secara fair, mana yang bagus akan kita apresiasi, mana yang tidak bagus akan kita sampaikan koreksi. Dan saya melihat, peran itu semua telah dijalankan dengan baik oleh Fraksi PKS.

PKS memiliki semangat yang kuat untuk memberikan yang terbaik untuk Rakyat. Karenanya kita punya tagline "Bersama Melayani Rakyat". Dan harus dipahami, ini bukan sekedar tag line namun merupakan semangat dasar yang menjiwai kinerja PKS.

26

kaleidoskop
2021

Selamat TAHUN BARU 2022



DR. Salim Segaf Al Jufri
Ketua Majelis Syuro PKS

Habib Aboe Bakar Al-Habsy
Sekretaris Jendral PKS

H. Ahmad Syaikh
Presiden PKS

H. Mahfudz Abdurrahman
Wandahara Umum PKS

PROFIL KOMIKUS



NasSirun PurwoKartun

(Pembuat Komik "PKS mempertanyakan penghapusan CPNS guru menjadi tenaga PPPK")

Seorang kartunis dan penulis yang sedang belajar menjadi suami romantis. Buku yang sudah diterbitkan sebanyak 73 karya pribadi dan 26 buku antologi. Beberapa kali menjuarai lomba kartun, salah satunya Juara I Lomba Kartun Serial Anti Korupsi, KPK 2006.

Fuqon LW (Elwe)

(Pembuat komik "PKS Menolak penghapusan santunan korban meninggal Covid oleh Kemensos")

Lahir di Pekanbaru, 1971. Setelah menamatkan sekolah kejuruan ekonomi pada 1991, langsung bergabung dengan harian Riau Pos sebagai kartunis opini di koran yang terbit di Pekanbaru tersebut. Kini menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Sejak 2014 menjadi kartunis lepas dan mengelola situs elwecartoon.id. Karena Korona adalah buku kumpulan kartun keempatnya setelah riAaaauu..., Negeriku (2003), Kumpulan Kartun Opini Riau Pos Grup (2005) dan Riau Bustanul Kartun (2017).
Ig: @elwecartoon.id



Seto Buje

(Pembuat komik "PKS menolak impor beras 1jt Ton")

Ig: @seto.buje

Bangdzia

(Pembuat komik "PKS menolak tegas kenaikan TDL saat pandemi" dan "UU Cilaka ditolak MK, sejak awal PKS memang sudah menolak")

Adalah nama pena dari Zia Ul Haq, desainer dan ilustrator dari Yogyakarta, Author komik 'Gambar itu Haram?'. Bersama Tanfidz T. dan Asa G.Lizadi membuat kanal komik dakwah @lingkarkomik.



Zarki

(Pembuat komik "PKS memperjuangkan RUU perlindungan Tokoh Agama")

Lulus seni rupa IKIP Rawamangun tahun 1993, mulai ngomik bersama Studio Bijac tahun 1995. Aktif di MKI sejak 2001, 2005 bersama Beng Rahadian dan Hikmat Darmawan mendirikan Akademi Samali. Memulai karir sebagai animator di BJCF, Wacha Animation, MNC Animation, sekarang menjadi ilustrator lepas.

PROFIL KOMIKUS



Esa Yuandana

(Pembuat komik "PKS mengritik TWK utk pegawai KPK")

Asal Sukabumi

@esayuanda / @kosimkomik

Fakhri

(Pembuat komik "Arus WNA makin meningkat")

@miffakhri



Imas Ajriana Utami

(Pembuat komik "kematian Covid 100rb jiwa, PKS desak pemery untuk serius tekan angka kematian")

Suka mencorat-corek sejak kecil. Setelah menapaki jalan indie saat sekolah, ia berkulat di penerbitan sebagai ilustrator dan komikus di tahun 2015. Hobi melihat langit biru dan alam yang hijau.

Kalau punya sayap ingin terbang mengelilingi angkasa.

Feel free to contact and chitchat ^^/

<https://linktr.ee/ajriana>

Ig: @ajriana13

Ardian Syaf

(Pembuat komik "PKS kritik utang negara tembus 6rb trilyun")

Ig: @ardian_syaf



JJ Wind

(Pembuat komik "Ecky Awal Mucharam dg menggunakan selang oksigen tetap rapat mengawal RUU pajak")

Ilustrator buku anak untuk Penerbit Noura, Mizan dan Rumah Pensil Publisher. Selain itu menjadi kontributor untuk BlackPack.co (Amerika), Blink Publisher (Malaysia) dll.

PROFIL KOMIKUS



Bangridh

(Pembuat komik "UU IKN : PKS tolak pemindahan ibukota, tidak relevan dg kondisi pandemi")

Asal Bandung. Memulai dakwah kreatif melalui kreasi konten digital sejak 2016.

Ig: @heyjong

Ipotskye

(Kordinator artist)

Ig: @ipotskye



Afwan Riyadi

(Editor in Chief)

Ig: @afwan_riyadi



PKS

www.pks.id



@pk_sejahtera



pkstv



partai keadilan sejahtera